



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. SALINAN ing.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1/ PID / TPK/ 2017 / PTTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDIN  
Tempat Lahir : Teluk Betung  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 16 Agustus 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Beruang Puri Rupi A.4 No. 18 Kel. SukabumiKec. Sukabumi Kota BandarLampung;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS Kantor Samsat Gunung Sugih KabupatenLampung Tengah  
Pendidikan Terakhir : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016



4. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016.
6. Penahanan oleh hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum A. RAHMAN, S.H., dan DWI PUTRI MELATI, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor LAW FIRM A & R, yang beralamat di Jl. Alam Indah No. 12 A BTN II Way Halim Permai Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Januari 2017 Nomor 34/SK/2017/PN.Tjk;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 3 Februari 2017 :01/Pen.SusPid./TPK/2017/PT.TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang dibacakan dalam persidangan tanggal 8 September 2016, Nomor Reg. Perkara :PDS -05/G.Sugih/07/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDIN selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor : 800/0132/III.18/06/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang Mutasi Pegawai Dalam Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan selaku staf Pelaksana Unit Pelayanan Cepat (UPC) Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lamteng bersama sama saksi ABE RONADO alias ABE bin RISKA SALEH selaku mantan Pegawai Honor Lepas (PHL) di bagian Unit Pelayanan Cepat (UPC) Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lamteng dan SLAMET RIADY als ADI bin AZRIDISYAH selaku Pegawai Honor Lepas (PHL) Kantor Samsat Gunung Sugih Kab. Lampung (keduanya berkas perkara terpisah), sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 s/d tahun 2015, bertempat di Kantor Samsat Gunung Sugih Jl. Raya Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan MA RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Febuari 2011), telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa ia Terdakwa AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDIN selaku Pegawai di Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor : 800/0132/III.18/06/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang Mutasi Pegawai Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, selanjutnya pada bulan Juni 2011 Terdakwa Agus Firmansyah bin Nizom Sirajuddin ditempatkan pada bagian UPC (Unit Pelayanan Cepat) Samsat Gunung Sugih sebagai staf pelaksana di UPC yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melayani wajib pajak yang akan melakukan perpanjangan pajak yaitu :

1. Bertindak sebagai kasir (Menerima uang pembayaran dari wajib pajak);
  2. Menyerahkan SKPD kepada wajib pajak;
  3. Turut membantu pekerjaan / kegiatan lain yang ada di UPC;
  4. Membuat laporan harian kepada KPP (Kepala Pungutan Pajak) tentang hasil kerja UPC;
  5. Menyetorkan uang ke Bank Lampung pada Samsat Gunung Sugih.
- Bahwa bentuk pelayanan yang ada di UPC ( Unit Pelayanan Cepat ) merupakan pelayanan Samsat drive Thru yaitu memberikan pilihan pelayanan bagi masyarakat (wajib pajak) dalam melaksanakan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB serta SWDKLLJ tanpa harus turun dari kendaraannya dengan mekanisme pelayanan di UPC yaitu :
- a. Wajib pajak melakukan pendaftaran pada petugas Polri dengan menyerahkan dokumen asli berupa BPKB, KTP, STNK dan SKPD;
  - b. BPKB dan KTP dikembalikan kepada wajib pajak oleh petugas Polri;
  - c. SKPD lama dan STNK lama milik Wajib pajak diserahkan kepada petugas UPC untuk Penetapan besaran pajak, selanjutnya dilakukan pencetakan SKPD dan STNK baru ;
  - d. Wajib pajak melakukan Pembayaran di kasir bagian UPC;
  - e. Penyerahan SKPD baru dan STNK baru kepada Wajib Pajak.
- Bahwa dalam pencetakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) di UPC ( Unit Pelayanan Cepat ) dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :
1. SKPD warna coklat (asli) : diberikan kepada wajib pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SKPD warna biru (tindakan) : diberikan kepada bendahara;
  3. SKPD warna hijau (tindakan) : diberikan kepada Jasa Raharja;
  4. SKPD warna merah (tindakan) : diberikan kepada UPTD;
  5. SKPD warna kuning (tindakan) : diberikan kepada Polri;
- Bahwa Terdakwa *AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDIN* selaku staf pelaksana UPC bertanggung jawab dalam memberikan tindakan SKPD dari UPC kepada Wajib Pajak dan pendistribusian tindakan SKPD dari UPC kepada bagian – bagian pengarsipan sesuai peruntukannya dan melaporkan semua penggunaan SKPD yang ada di UPC kepada KPP (Kepala Pemungutan Pajak) setiap harinya.
  - Bahwa dalam menjalankan tugas Terdakwa *AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDIN* di UPC Samsat Gunung Sugih dibantu oleh beberapa orang staf yaitu saksi *BENY ALVI GUTAMA* selaku staf UPC dan beberapa tenaga honor lepas yang bekerja secara bergantian diantaranya saksi *BADRUN*, saksi *DARTO* dan saksi *NICKO* yang membantu pencetakan SKPD dan Petugas Polri pada bagian pendaftaran.
  - Bahwa untuk SKPD yang digunakan di bagian UPC dan nomor seri SKPD yang tercantum terdata dalam sistem komputer di Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
  - Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2014, saksi *Slamet Riady* menerima kuasa dari biro jasa CV. Agung Lestari untuk pengurusan surat – surat kendaraan baru mobil berupa foto kopi KTP pemilik kendaraan, Hasil cek fisik kendaraan, serta rekapan faktur kendaraan yang akan mengajukan bea balik nama kendaraan baru (BBNKB) di kantor Samsat Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi *Slamet Riady* meminta bantuan saksi *Cholik Amalik* (pegawai honor lepas) di bagian cetak Tanda Nomor Kendaraan Baru (TNKB) pada loket II, untuk mengurus surat – surat kendaraan baru tersebut yang selanjutnya saksi *Slamet Riady* menyuruh saksi *Cholik Amalik* membuka rekening di Bank Lampung untuk menerima transferan uang pengurusan



BBNKB dari CV. Agung Lestari, kemudian saksi Cholik Amalik membuka rekening di Bank Lampung Cabang Gunung Sugih dengan No rekening 38.5030.4102.101 atas nama Cholik Amalik.

- Bahwa kemudian saksi Cholik Amalik memberi kode "Mik" pada berkas kendaraan baru untuk memberi tanda berkas yang diurus oleh saksi Cholik Amalik, selanjutnya berkas dimasukkan ke loket I untuk dilakukan pendaftaran, selesai di loket I diserahkan di loket II guna Registrasi kendaraan untuk mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Baru/TNKB atau Nomor Polisi, kemudian berkas dikembalikan ke loket I untuk entry data di komputer, lalu saksi Cholik Amalik membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa administrasi STNK dan administrasi TNKB di loket II (bank BRI), setelah melakukan pembayaran di loket II kemudian saksi Cholik Amalik mengambil berkas kendaraan baru di loket I selanjutnya dipisahkan antara yang berkas asli dan fotocopy, berkas asli diserahkan ke bagian cek fisik untuk pencetakan STNK yang ada di loket II, sedangkan berkas fotocopy diserahkan ke loket III untuk dikeluarkan kutipan pajak oleh petugas penetapan pajak.
- Bahwa setelah kutipan pajak keluar dari loket III yaitu berwarna putih, merah dan kuning yang tertera jumlah PKB, BBNKB dan SWDKLJJ /Jasa Raharja yang harus dibayar pada loket IV (Bank Lampung) dan telah ditandatangani petugas korektor di loket III diterima saksi Cholik Amalik kemudian saksi Cholik Amalik menghitung jumlah keseluruhan PKB, BBNKB kemudian melaporkan jumlah yang harus dibayar tersebut kepada saksi Slamet Riady akan tetapi saksi Slamet Riady mengatakan agar pembayaran PKB dan BBNKB depending pembayarannya, selanjutnya saksi Slamet Riady meminta agar lembar kutipan pajak beserta fotocopy berkas kendaraan baru diserahkan kepada saksi Slamet Riady dengan alasan akan dicocokkan lebih dahulu antara uang yang masuk ke rekening Bank Lampung atas nama saksi Cholik Amalik dari CV. Agung Lestari dengan keseluruhan jumlah yang akan dibayar, selanjutnya saksi Slamet Riady meminta kepada saksi Cholik Amalik agar uang yang ada direkening bank Lampung milik CV. Agung Lestari ditransfer ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi Slamet Riady di bank BNI no rekening : 0345368289 dengan alasan untuk dihitung kembali pembayaran PKB, BBNKB, selain itu saksi Cholik Amalik juga pernah diminta oleh saksi Slamet Riady memberikan uang secara tunai kepada saksi Slamet Riady.

- Bahwa saksi **SLAMET RIADY** telah mengetahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah merupakan Jenis Pajak Daerah/Provinsi yang merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah/Provinsi yang harus segera disetor ke kas Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bank Lampung Cabang Gunung Sugih, hal ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea balik nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Nomor 41 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang menyatakan bahwa : "Pembayaran BBNKB dilakukan melalui Kasir Bank/Petugas yang ditunjuk dan disetorkan pada Nomor rekening Penerimaan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung pada PT Bank Lampung atau BPP-PKB/BBNKB pada kantor bersama Samsat.
- Bahwa jumlah kutipan-kutipan pajak kendaran baru yang seharusnya diserahkan kepada loket IV di Bank Lampung untuk dilakukan pembayaran PKB dan BBNKB yang tertera di kutipan pajak tersebut sebanyak 111 kutipan pajak tidak pernah dikembalikan oleh saksi Slamet Riady kepada saksi Cholik Amalik, tetapi oleh saksi **SLAMET RIADY** kutipan – kutipan pajak tersebut diberikan kepada saksi Ahmad Abe Ronado untuk dijadikan acuan atau pedoman mencetak sendiri besaran nilai PKB, BBNKB di blangko kosong Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) warna coklat yang telah dipersiapkan oleh saksi Slamet Riady bersama – sama saksi Ahmad Abe Ronado di luar sistem Samsat Gunung Sugih, dimana SKPD asli warna coklat tersebut diantaranya berasal dari Terdakwa **AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAJUDDIN yang telah dipergunakan di UPC Samsat Gunung Sugih untuk kendaraan bermotor roda dua sebanyak 14 SKPD.

- Bahwa blangko kosong SKPD warna coklat diperoleh Terdakwa AGUS FIRMANSYAH dengan cara pada saat Terdakwa yang bertugas sebagai staf pelaksana di UPC Samsat Gunung Sugih mencetak SKPD yang diperuntukan bagi wajib pajak yang mengurus perpanjangan pajak kendaraan roda dua di UPC Samsat Gunung Sugih seharusnya Terdakwa memberikan SKPD warna coklat kepada wajib pajak namun dengan maksud untuk dipergunakan secara melawan hukum Terdakwa mengambil SKPD warna coklat tersebut sedangkan kepada wajib pajak Terdakwa AGUS FIRMANSYAH menyerahkan SKPD warna merah salah satunya kepada saksi SUBADI Bin SUWITO REJO pemilik kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand No. Pol : BE 8733 GE dan SKPD warna kuning kepada saksi JUMADI pemilik kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol : BE 5074 HN.
- Bahwa kemudian 14 SKPD tersebut Terdakwa AGUS FIRMANSYAH serahkan kepada saksi Slamet Riady untuk digunakan dalam pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Baru (BBNKB) di Kantor Samsat Gunung Sugih melalui saksi Ahmad Abe Ronado secara bertahap sejak bulan Oktober 2014 s/d Maret 2015 bertempat di rumah saksi Ahmad Abe Ronado di Kemiling atau di jalan jembatan fly over korpri atau di rumah saksi Slamet Riady di Jalan Apel II nomor: 65-82 LK.I RT/RW: 002 Kel. Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, padahal Terdakwa AGUS FIRMANSYAH mengetahui SKPD tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kendaraan bermotor roda dua yang melakukan perpanjangan pajak di UPC Kantor Samsat Gunung Sugih.
- Bahwa 14 SKPD tersebut yang telah dipergunakan Terdakwa Agus Firmansyah untuk wajib pajak yang mengurus perpanjangan pajak kendaraan roda dua di UPC Samsat Gunung Sugih yaitu sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NO	NAMA PEMILIK KENDARAAN	NOMOR POLISI	JENIS KENDARAAN	NOMOR SKPD	TANGGAL DITETAPKAN SKPD
1	MEDI SUGIANTO	BE 7313 HQ	SEPEDA MOTOR	0511379	30 Juli 2013 / 06 Oktober 2014
2	SUBADI	BE 8733 GE	SEPEDA MOTOR	0518731	22 Oktober 2014
3	YULIANA	BE 5333 HK	SEPEDA MOTOR	0519438	03 Nopember 2014
4	WAHIDIN	BE 5421 HX	SEPEDA MOTOR	0519470	03 Nopember 2014
5	SUGIK WIDODO	BE 7175 HP	SEPEDA MOTOR	0726676	17 Nopember 2014
6	WARYANTI	BE 3529 IC	SEPEDA MOTOR	0726677	17 Nopember 2014
7	SUROSO	BE 5206 GK	SEPEDA MOTOR	0727210	24 Nopember 2014
8	TUIRAN	BE 4285 GN	SEPEDA MOTOR	0727385	27 Nopember 2014
9	MUHAMMAD ROHIM	BE 8753 GQ	SEPEDA MOTOR	0826751	117 Desember 2014
10	TUKIJAN	BE 7558 HI	SEPEDA MOTOR	0827936	07 Januari 2015
11	SLAMET	BE 6757 HW	SEPEDA MOTOR	0924259	10 Januari 2015
12	JUMADI	BE 5074 HN	SEPEDA MOTOR	0925421	27 Januari 2015
13	SAYONO	BE 8152 HM	SEPEDA MOTOR	0925444	27 Januari 2015
14	SUKIJO	BE 4735 GW	SEPEDA MOTOR	1025125	20 Februari 2015

- Bahwa selanjutnya blangko kosong SKPD warna coklat yang diberikan oleh Terdakwa AGUS FIRMANSYAH tersebut diketik oleh saksi Ahmad Abe Ronadodengan cara membuat program yang mirip dengan blangko lembar SKPD yang asli di program komputer, setelah program yang ada di komputer terbuka saksi Ahmad Abe Ronado mengisi kolom-kolom yang ada di blangko SKPD sesuai dengan data berkas kendaraan yang diberikan oleh saksi Cholik Amalik kepada saksi Slamet Riyadi yang sudah ada nomor polisi, nama pemilik,alamat, type,merk, jenis, tahun pembuatan, warna kendaraan, isi silinder, no rangka, nomor mesin, nomor bpkb,bahan bakar, warna tnkb, berat, jumlah sumbu, Jbb/penumpang, berlaku sampai, nomor kahir, nilai jumlah



pagak, tanggal ditetapkan, petugas penetapan, korektor, tandatangan. Kemudian setelah data di SKPD diisi oleh saksi Ahmad Abe Ronado selanjutnya SKPD dicetak dan diserahkan kepada saksi SLAMET RIADY sehingga seolah-olah blangko SKPD dicetak atau dikeluarkan dari Kantor Samsat Gunung Sugih, hal ini yang dilakukan secara bertahap di rumah saksi Slamet dengan menggunakan CPU, komputer rakitan dan printer merek Epson type LQ 2180 warna putih dan printer scanner merk Canon serta flashdisk warna hitam untuk menyimpan file dan program SKPD, sedangkan printer merek Epson type LQ 2180 warna putih merupakan barang inventaris bagian UPC Samsat Gunung Sugih yang hilang.

- Bahwa setelah selesai diketik SKPD yang seolah-olah berasal dari Kantor Samsat Gunung Sugih tersebut oleh saksi Ahmad Abe Ronado kemudian diserahkan kepada saksi Slamet selanjutnya SKPD tersebut secara bertahap saksi Slamet serahkan kepada pihak biro jasa CV. Agung Lestari.
- Bahwa dari 14 SKPD yang berasal dari Terdakwa Agus Firmansyah diserahkan secara bertahap kepada saksi Ahmad Abe Ronado secara bertahap sejak bulan Oktober 2014 s.d bulan Maret 2015, yang kemudian dipergunakan oleh saksi Slamet Riady untuk bea balik nama kendaraan baru (BBNKB) di Samsat Gunung Sugih dengan tidak dibayarkan uang PKB dan BBNKB di Bank Lampung Samsat Gunung Sugih yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA PEMILIK KENDARAAN	NOMOR POLISI	JENIS KENDARAAN	NOMOR SKPD	TGL DITETAPKAN SKPD
1	ABDULLAH SURAJAYA	BE 1582 GA	Mobil Toyota Fortuner	0511379	08 Oktober 2014
2	EVAWAHYUNINGATI	BE 2408 GN	Mobil Toyota Yaris	0518731	15 Oktober 2014
3	ABSOH	BE 2432 GN	Mobil Toyota Innova	0519438	29 Oktober 2014
4	YUSRIYANTO	BE 2430 GN	Mobil	0519470	29 Oktober 2014



			Toyota Innova		
5	ASIH PATMASIH	BE 2555 GN	Mobil Toyota Innova	0726676	14 Nopember 2014
6	WIDODO	BE 2569 GN	Mobil Daihatsu Terios	0726677	18 Nopember 2014
7	SENANG BELAWAN	BE 1596 GA	Mobil Toyota Fortuner	0727210	19 Nopember 2014
8	ELIAN	BE 2599 GN	Mobil Honda Mobilio	0727385	27 Nopember 2014
9	IWAN	BE 1603 GA	Mobil Mitsubishi Pajero	0826751	17 Desember 2014
10	EKA PUTRI T	BE 2825 GN	Mobil Daihatsu Terios	0827936	09 Januari 2015
11	NYOMAN SUDANI	BE 2845 GN	Mobil Toyota Avanza	0924259	12 Januari 2015
12	YUSTINA ARIYANTI	BE 9172 GP	Mobil Mitsubishi L 300	0925421	28 Januari 2015
13	DESI APRIYANTI	BE 2956 GN	Mobil Nissan Grand Livina	0925444	28 Januari 2015
14	RIO BUDI SAKA	BE 9315 GP	Truk Mitsubishi Fuso	1025125	12 Maret 2015

- Bahwa dari penyerahan blangko kosong SKPD warna coklat oleh Terdakwa Agus Firmansyah kepada saksi Slamet melalui saksi Abe Ronado yang dipergunakan untuk BBNKB, dengan tidak melakukan pembayaran/penyetorkan uang PKB dan BBN-KB ke kas Daerah Provinsi Lampung melalui Bank Lampung yang ada di Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, telah melawan hukum dengan melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 16 ayat (2) yang menyatakan : Penerimaan harus disetor



seluruhnya ke Kas Negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

2. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (10) yang menyatakan : Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .

Pasal 2 ayat (1) : Jenis Pajak Provinsi terdiri atas a. Pajak Kendaraan bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 ayat (3) : Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya Pasal 122 ayat (4) : Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
5. Surat Keputusan Bersama KAPOLRI, Direktur Jendral Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan nomor SKEP/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 Lampiran BAB I Huruf A Poin 5e : Pengesahan STNK dilakukan setelah PKB , BBN-KB dan SWDKLJJ dibayar.
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea balik nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Nomor 41 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), ditetapkan sbb :

Pembayaran BBN-KB dilakukan melalui Kasir Bank/Petugas yang ditunjuk dan disetorkan pada Nomor rekening Penerimaan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung pada PT Bank Lampung atau BPP-PKB /BBNKB pada kantor bersama Samsat.

- Bahwa atas pemberian blangko SKPD warna coklat oleh Terdakwa Agus Firmansyah ke saksi Ahmad Abe Ronado yang digunakan oleh Slamet Riyadi untuk pengurusan kendaraan baru di Samsat Gunung Sugih, Terdakwa diberikan bagian uang oleh saksi Slamet Riady melalui saksi Ahmad Abe Ronado sebanyak 3 kali yaitu pertama sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketiga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai hasil pembagian dari pemberian blangko kosong SKPD warna coklat kepada saksi Slamet Riyadi telah memperkaya Terdakwa Agus firmansyah bin Nizom sirajuddin sebesar Rp123.000.0000,- atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Firmansyah bin Nizom Sirajuddin yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Slamet Riyadi dan saksi Abe Ronado telah mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 385.537.400 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut yang merupakan bagian jumlah kerugian keuangan negara sesuai Surat BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor Rp. 2.493.785.150,- ( dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-688/PW08/5/2016 tanggal 18 April 2016, Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang Pajak Kendaraan (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2014 s/d 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa Agus Firmansyah bin Nizom Sirajuddin tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDIN selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor : 800/0132/III.18/06/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang Mutasi Pegawai Dalam Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan staf pelaksana Unit Pelayanan Cepat (UPC) Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, bersama sama saksi ABE RONADO alias ABE bin RISKA SALEH selaku mantan Pegawai Honor Lepas (PHL) di bagian Unit Pelayanan Cepat (UPC) Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan SLAMET RIADY als ADI bin AZRIDISYAH selaku Pegawai Honor Lepas (PHL) Kantor Samsat Gunung Sugih Kab. Lampung (keduanya berkas perkara terpisah), sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 s/d tahun 2015, bertempat di Kantor Samsat Gunung Sugih Jl. Raya Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ( berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan MA RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Febuari 2011), telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa ia Terdakwa *AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDIN* selaku Pegawai di Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor : 800/0132/III.18/06/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang Mutasi Pegawai Dalam Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, selanjutnya pada bulan Juni 2011 Terdakwa Agus Firmansyah bin Nizom Sirajuddin ditempatkan pada bagian UPC (Unit Pelayanan Cepat) Samsat Gunung Sugih sebagai staf pelaksana di UPC yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam melayani wajib pajak yang akan melakukan perpanjangan pajak yaitu :

1. Bertindak sebagai kasir (Menerima uang pembayaran dari wajib pajak);
2. Menyerahkan SKPD kepada wajib pajak;
3. Turut membantu pekerjaan / kegiatan lain yang ada di UPC;
4. Membuat laporan harian kepada KPP (Kepala Pungutan Pajak) tentang hasil kerja UPC;
5. Menyetorkan uang ke Bank Lampung pada Samsat Gunung Sugih.

- Bahwa bentuk pelayanan yang ada di UPC ( Unit Pelayanan Cepat ) merupakan pelayanan Samsat drive Thru yaitu memberikan pilihan pelayanan bagi masyarakat (wajib pajak) dalam melaksanakan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB serta SWDKLLJ tanpa harus turun dari kendaraannya dengan mekanisme pelayanan di UPC yaitu :

1. Wajib pajak melakukan pendaftaran pada petugas Polri dengan menyerahkan dokumen asli berupa BPKB, KTP, STNK dan SKPD;
2. BPKB dan KTP dikembalikan kepada wajib pajak oleh petugas Polri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SKPD lama dan STNK lama milik Wajib pajak diserahkan kepada petugas UPC untuk Penetapan besaran pajak, selanjutnya dilakukan pencetakan SKPD dan STNK baru ;
  4. Wajib pajak melakukan Pembayaran di kasir bagian UPC;
  5. Penyerahan SKPD baru dan STNK baru kepada Wajib Pajak.
- Bahwa dalam pencetakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) di UPC ( Unit Pelayanan Cepat ) dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :
    1. SKPD warna coklat (asli) : diberikan kepada wajib pajak;
    2. SKPD warna biru (tindasan) : diberikan kepada bendahara;
    3. SKPD warna hijau (tindasan) : diberikan kepada Jasa Raharja;
    4. SKPD warna merah (tindasan) : diberikan kepada UPTD;
    5. SKPD warna kuning (tindasan) : diberikan kepada Polri;
  - Bahwa Terdakwa *AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDIN* selaku staf pelaksana UPC bertanggung jawab dalam memberikan tindasan SKPD dari UPC kepada Wajib Pajak dan pendistribusian tindasan SKPD dari UPC kepada bagian – bagian pengarsipan sesuai peruntukannya dan melaporkan semua penggunaan SKPD yang ada di UPC kepada KPP (Kepala Pemungutan Pajak) setiap harinya.
  - Bahwa dalam menjalankan tugas Terdakwa *AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDIN* di UPC Samsat Gunung Sugih dibantu oleh beberapa orang staf yaitu saksi BENY ALVI GUTAMA selaku staf UPC dan beberapa tenaga honor lepas yang bekerja secara bergantian diantaranya saksi BADRUN, saksi DARTO dan saksi NICKO yang membantu pencetakan SKPD dan Petugas Polri pada bagian pendaftaran.
  - Bahwa untuk SKPD yang digunakan di bagian UPC dan nomor seri SKPD yang tercantum terdata dalam sistem komputer di Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2014, saksi *Slamet Riady* menerima kuasa dari biro jasa CV. Agung Lestari untuk pengurusan surat – surat kendaraan baru mobil berupa foto kopi KTP pemilik kendaraan, Hasil cek fisik kendaraan, serta rekapan faktur kendaraan yang akan mengajukan bea balik nama kendaraan baru (BBNKB) di kantor Samsat Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi Slamet Riady meminta bantuan saksi Cholik Amalik (pegawai honor lepas) di bagian cetak Tanda Nomor Kendaraan Baru (TNKB) pada loket II, untuk mengurus surat – surat kendaraan baru tersebut yang selanjutnya saksi Slamet Riady menyuruh saksi Cholik Amalik membuka rekening di Bank Lampung untuk menerima transferan uang pengurusan BBNKB dari CV. Agung Lestari, kemudian saksi Cholik Amalik membuka rekening di Bank Lampung Cabang Gunung Sugih dengan No rekening 38.5030.4102.101 atas nama Cholik Amalik.
- Bahwa kemudian saksi Cholik Amalik memberi kode “Mlk” pada berkas kendaraan baru untuk memberi tanda berkas yang diurus oleh saksi Cholik Amalik, selanjutnya berkas dimasukkan ke loket I untuk dilakukan pendaftaran, selesai di loket I diserahkan di loket II guna Registrasi kendaraan untuk mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Baru/TNKB atau Nomor Polisi, kemudian berkas dikembalikan ke loket I untuk entry data di komputer, lalu saksi Cholik Amalik membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa administrasi STNK dan administrasi TNKB di loket II (bank BRI), setelah melakukan pembayaran di loket II kemudian saksi Cholik Amalik mengambil berkas kendaraan baru di loket I selanjutnya dipisahkan antara yang berkas asli dan fotocopy, berkas asli diserahkan ke bagian cek fisik untuk pencetakan STNK yang ada di loket II, sedangkan berkas fotocopy diserahkan ke loket III untuk dikeluarkan kutipan /penetapan pajak oleh petugas penetapan pajak.
- Bahwa setelah kutipan pajak keluar dari loket III yaitu berwarna putih, merah dan kuning yang tertera jumlah PKB, BBNKB dan SWDKLJJ /Jasa Raharja yang harus dibayar pada loket IV (Bank Lampung) dan telah ditandatangani petugas korektor di loket III diterima saksi Cholik Amalik kemudian saksi Cholik



Amalik menghitung jumlah keseluruhan PKB, BBNKB kemudian melaporkan jumlah yang harus dibayar tersebut kepada saksi Slamet Riady akan tetapi saksi Slamet Riady mengatakan agar pembayaran PKB dan BBNKB depending pembayarannya, selanjutnya saksi Slamet Riady meminta agar lembar kutipan pajak beserta fotocopy berkas kendaraan baru diserahkan kepada saksi Slamet Riady dengan alasan akan dicocokkan lebih dahulu antara uang yang masuk ke rekening Bank Lampung atas nama saksi Cholik Amalik dari CV. Agung Lestari dengan keseluruhan jumlah yang akan dibayar, selanjutnya saksi Slamet Riady meminta kepada saksi Cholik Amalik agar uang yang ada direkening bank Lampung milik CV. Agung Lestari ditransfer ke rekening saksi Slamet Riady di bank BNI no rekening : 0345368289 dengan alasan untuk dihitung kembali pembayaran PKB, BBNKB, selain itu saksi Cholik Amalik juga pernah diminta oleh saksi Slamet Riady memberikan uang secara tunai kepada saksi Slamet Riady.

- Bahwa saksi Slamet Riady telah mengetahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah merupakan Jenis Pajak Daerah/Provinsi yang merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah/Provinsi yang harus segera disetor ke kas Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bank Lampung Cabang Gunung Sugih, hal ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea balik nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Nomor 41 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang menyatakan bahwa : "Pembayaran BBNKB dilakukan melalui Kasir Bank/Petugas yang ditunjuk dan disetorkan pada Nomor rekening Penerimaan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung pada PT Bank Lampung atau BPP-PKB /BBNKB pada kantor bersama Samsat.
- Bahwa jumlah kutipan-kutipan pajak kendaran baru yang seharusnya diserahkan kepada loket IV di Bank Lampung untuk dilakukan pembayaran



PKB dan BBNKB yang tertera di kutipan pajak tersebut sebanyak 111 kutipan pajak tidak pernah dikembalikan oleh saksi Slamet Riady kepada saksi Cholik Amalik, tetapi oleh saksi *Slamet Riady* kutipan – kutipan pajak tersebut diberikan kepada saksi Ahmad Abe Ronado untuk dijadikan acuan atau pedoman mencetak sendiri besaran nilai PKB, BBNKB di blangko kosong Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) warna coklat yang telah dipersiapkan oleh saksi Slamet Riady bersama – sama saksi Ahmad Abe Ronado di luar sistem Samsat Gunung Sugih, dimana SKPD asli warna coklat tersebut diantaranya berasal dari Terdakwa AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDIN yang telah dipergunakan di UPC Samsat Gunung Sugih untuk kendaraan bermotor roda dua sebanyak 14 SKPD.

- Bahwa blangko kosong SKPD warna coklat diperoleh Terdakwa AGUS FIRMANSYAH dengan cara pada saat Terdakwa yang bertugas sebagai staf pelaksana di UPC Samsat Gunung Sugih mencetak SKPD yang diperuntukan bagi wajib pajak yang mengurus perpanjangan pajak kendaraan roda dua di UPC Samsat Gunung Sugih seharusnya Terdakwa memberikan SKPD warna coklat kepada wajib pajak namun dengan maksud untuk dipergunakan secara melawan hukum Terdakwa mengambil SKPD warna coklat tersebut sedangkan kepada wajib pajak Terdakwa AGUS FIRMANSYAH menyerahkan SKPD warna merah salah satunya kepada saksi SUBADI Bin SUWITO REJO pemilik kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand No. Pol : BE 8733 GE dan SKPD warna kuning kepada saksi JUMADI pemilik kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol : BE 5074 HN.
- Bahwa kemudian 14 SKPD tersebut Terdakwa AGUS FIRMANSYAH serahkan kepada saksi Slamet Riady untuk digunakan dalam pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Baru (BBNKB) di Kantor Samsat Gunung Sugih melalui saksi Ahmad Abe Ronado secara bertahap sejak bulan Oktober 2014 s/d Maret 2015 bertempat di rumah saksi Ahmad Abe Ronado di Kemiling atau di jalan jembatan fly over korpri atau di rumah saksi Slamet Riady di Jalan Apel II nomor: 65-82 LK.I RT/RW: 002 Kel. Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampung, padahal Terdakwa AGUS FIRMANSYAH mengetahui SKPD tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kendaraan bermotor roda dua yang melakukan perpanjangan pajak di UPC Kantor Samsat Gunung Sugih.

- Bahwa 14 SKPD tersebut yang telah dipergunakan Terdakwa Agus Firmansyah untuk wajib pajak yang mengurus perpanjangan pajak kendaraan roda dua di UPC Samsat Gunung Sugih yaitu sebagai berikut :

No	NAMA PEMILIK KENDARAAN	NOMOR POLISI	JENIS KENDARAAN	NOMOR SKPD	TANGGAL DITETAPKAN SKPD
1	MEDI SUGIANTO	BE 7313 HQ	SEPEDA MOTOR	0511379	30 Juli 2013 / 06 Oktober 2014
2	SUBADI	BE 8733 GE	SEPEDA MOTOR	0518731	22 Oktober 2014
3	YULIANA	BE 5333 HK	SEPEDA MOTOR	0519438	03 Nopember 2014
4	WAHIDIN	BE 5421 HX	SEPEDA MOTOR	0519470	03 Nopember 2014
5	SUGIK WIDODO	BE 7175 HP	SEPEDA MOTOR	0726676	17 Nopember 2014
6	WARYANTI	BE 3529 IC	SEPEDA MOTOR	0726677	17 Nopember 2014
7	SUROSU	BE 5206 GK	SEPEDA MOTOR	0727210	24 Nopember 2014
8	TUIRAN	BE 4285 GN	SEPEDA MOTOR	0727385	27 Nopember 2014
9	MUHAMMAD ROHIM	BE 8753 GQ	SEPEDA MOTOR	0826751	17 Desember 2014
10	TUKIJAN	BE 7558 HI	SEPEDA MOTOR	0827936	07 Januari 2015
11	SLAMET	BE 6757 HW	SEPEDA MOTOR	0924259	10 Januari 2015
12	JUMADI	BE 5074 HN	SEPEDA MOTOR	0925421	27 Januari 2015
13	SAYONO	BE 8152 HM	SEPEDA MOTOR	0925444	27 Januari 2015
14	SUKIJO	BE 4735 GW	SEPEDA MOTOR	1025125	20 Februari 2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya blangko kosong SKPD warna coklat yang diberikan oleh Terdakwa AGUS FIRMANSYAH tersebut diketik oleh saksi Ahmad Abe Ronadodengan cara membuat program yang mirip dengan blangko lembar SKPD yang asli di program komputer, setelah program yang ada di komputer terbuka saksi Ahmad Abe Ronado mengisi kolom-kolom yang ada di blangko SKPD sesuai dengan data berkas kendaraan yang diberikan oleh saksi Cholik Amalik kepada saksi Slamet Riyadi yang sudah ada nomor polisi, nama pemilik, alamat, type, merk, jenis, tahun pembuatan, warna kendaraan, isi silinder, no rangka, nomor mesin, nomor bpkb, bahan bakar, warna tnkb, berat, jumlah sumbu, Jbb/penumpang, berlaku sampai, nomor kohir, nilai jumlah pajak, tanggal ditetapkan, petugas penetapan, korektor, tandatangan. Kemudian setelah data di SKPD diisi oleh saksi Ahmad Abe Ronado selanjutnya SKPD dicetak dan diserahkan kepada saksi SLAMET RIADY sehingga seolah-olah blangko SKPD dicetak atau dikeluarkan dari Kantor Samsat Gunung Sugih, hal ini yang dilakukan secara bertahap di rumah saksi Slamet dengan mempergunakan CPU, komputer rakitan dan printer merek epson type LQ 2180 warna putih dan printer scanner merk canon serta flesdish warna hitam untuk menyimpan file dan program SKPD, sedangkan printer merek epson type LQ 2180 warna putih merupakan barang inventaris bagian UPC Samsat Gunung Sugih yang hilang .
- Bahwa setelah selesai diketik SKPD yang seolah-olah berasal dari Kantor Samsat Gunung Sugih tersebut oleh saksi Ahmad Abe Ronado kemudian diserahkan kepada saksi Slamet selanjutnya SKPD tersebut secara bertahap saksi Slamet serahkan kepada pihak biro jasa CV. Agung Lestari.
- Bahwa dari 14 SKPD yang berasal dari Terdakwa Agus Firmansyah diserahkan secara bertahap kepada saksi Ahmad Abe Ronado secara bertahap sejak bulan Oktober 2014 s/d bulan Maret 2015, yang kemudian dipergunakan oleh saksi Slamet Riady untuk bea balik nama kendaraan baru (BBNKB) di Samsat Gunung Sugih dengan tidak dibayarkan uang PKB dan BBNKB di Bank Lampung Samsat Gunung Sugih yaitu sebagai berikut :



NO	NAMA PEMILIK KENDARAAN	NOMOR POLISI	JENIS KENDARAAN	NO SKPD	TANGGAL DITETAPKAN SKPD
1	ABDULLAH SURAJAYA	BE 1582 GA	Mobil Toyota Fortuner	0511379	08 Oktober 2014
2	EVA WAHYUNINGATI	BE 2408 GN	Mobil Toyota Yaris	0518731	15 Oktober 2014
3	ABSOH	BE 2432 GN	Mobil Toyota Innova	0519438	29 Oktober 2014
4	YUSRIYANTO	BE 2430 GN	Mobil Toyota Innova	0519470	29 Oktober 2014
5	ASIH PATMIASIH	BE 2555 GN	Mobil Toyota Innova	0726676	14 Nopember 2014
6	WIDODO	BE 2569 GN	Mobil Daihatsu Terios	0726677	18 Nopember 2014
7	SENANG BELAWAN	BE 1596 GA	Mobil Toyota Fortuner	0727210	19 Nopember 2014
8	ELIAN	BE 2599 GN	Mobil Honda Mobilio	0727385	27 Nopember 2014
9	IWAN	BE 1603 GA	Mobil Mitsubishi Pajero	0826751	17 Desember 2014
10	EKA PUTRI T	BE 2825 GN	Mobil Daihatsu Terios	0827936	09 Januari 2015
11	NYOMAN SUDANI	BE 2845 GN	Mobil Toyota Avanza	0924259	12 Januari 2015
12	YUSTINA ARIYANTI	BE 9172 GP	Mobil Mitsubishi L 300	0925421	28 Januari 2015
13	DESI APRIYANTI	BE 2956 GN	Mobil Nissan	0925444	28 Januari 2015



			Grand Livina		
14	RIO BUDI SAKA	BE 9315 GP	Truk Mitsubishi Fuso	1025125	12 Maret 2015

- Bahwa dari penyerahan blangko kosong SKPD warna coklat oleh Terdakwa Agus firmansyah bin nizom sirajuddin kepada saksi Slamet yang dipergunakan untuk BBNKB, dengan tidak melakukan pembayaran/penyetorkan uang PKB dan BBNKB ke kas Daerah Provinsi Lampung melalui Bank Lampung yang ada di Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan telah menyalahgunakan kewenangannya telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 16 ayat (2) yang menyatakan : Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
2. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (10) yang menyatakan : Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 2 ayat (1) : Jenis Pajak Provinsi terdiri atas a. Pajak Kendaraan bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 ayat (3) : Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum daerah



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya Pasal 122 ayat (4) : Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
5. Surat Keputusan Bersama KAPOLRI , Direktur Jendral Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) , Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan nomor SKEP/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 Lampiran BAB I Huruf A Poin 5e : Pengesahan STNK dilakukan setelah PKB, BBN-KB dan SWDKLJJ dibayar.
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea balik nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Nomor 41 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), ditetapkan sbb :  
  
Pembayaran BBN-KB dilakukan melalui Kasir Bank/Petugas yang ditunjuk dan disetorkan pada Nomor rekening Penerimaan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung pada PT Bank Lampung atau BPP-PKB /BBNKB pada kantor bersama Samsat.
- Bahwa atas pemberian blangko SKPD warna coklat oleh Terdakwa AGUS FIRMANSYAH ke saksi Ahmad Abe Ronado yang digunakan oleh Slamet Riyadi untuk pengurusan kendaraan baru di Samsat Gunung Sugih, Terdakwa diberikan bagian uang oleh saksi Slamet Riady melalui saksi Ahmad Abe Ronado sebanyak 3 kali yaitu pertama sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketiga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai hasil pembagian dari pemberian blangko kosong SKPD warna coklat kepada saksi Slamet Riyadi telah memperkaya Terdakwa Agus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firmansyah bin nizom sirajuddin sebesar Rp123.000.0000,- atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Firmansyah bin Nizom Sirajuddin yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Slamet Riyadi dan saksi Ahmad Abe Ronado telah mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 385.537.400 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut yang merupakan bagian jumlah kerugian keuangan negara sesuai Surat BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor Rp. 2.493.785.150,- ( dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-688/PW08/5/2016 tanggal 18 April 2016 Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang Pajak Kendaraan (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2014 s/d 2015.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa Nomor Register Perkara: PDS -06.G.SUGIH/08/2016 tanggal 24 November 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin NIZOM SIRAJUDIN terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “ *Korupsi secara bersama-sama* ” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana  
termuat dalam dakwaan Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaAGUS FIRMANSYAH Bin NIZOM SIRAJUDIN dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar uang denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum TerdakwaAGUS FIRMANSYAH Bin NIZOM SIRAJUDIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;-----
4. Menyatakan barang bukti, berupa :

1	1 (satu) unit CPU merk LG warnaHitam.
2	1 (satu) unit Printer merk Epson Type LQ 2180 WarnaPutih.

No. 1 s/d 2 dirampas untuk dimusnahkan;

3	1 (satu) unit Printer merk Epson Type LQ 2180 WarnaPutih.
4	1 (satu) bundleBerkasPenyerahan STNK dariLoket 5 SamsatGunungSugihKab. Lampung Tengah.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	1 (satu) bundleberkascacatanpenerimauang PNBP Administrasi STNK dan TNKB diloket 2 SamsatGunungSugihKabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2015.
6	Asli 49 (empatpuluhsembilan) lembar SKPD WajibPajak.
7	92 (Sembilan puluhdua) Arsip BBN1

*No. 3 s/d 7 dikembalikan Kepada Samsat Gunung Sugih;*

8	1 (satu) bundleberkas data pendaftarandari system IT DIPENDA terkaitke 111 kendaraanbaru di SamsatGunungSugihKabupaten Lampung Tengah.
---	--

*No.8 dikembalikan Kepada Dipenda Provinsi Lampung;*

9	70 (tujuhpuluh) legalisir SKPD.
10	25 (dua puluh lima) Fotocopy SKPD Legalisir.
11	1 (satu) berkasFotocopyLegalisirAktePendirian CV. Agung Lestari.
12	1 (satu) berkas Foto copy Legalisir Surat Perjanjian / MOU SlametRiadidengan CV. Agung Lestari.
13	1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban Sdr. SLAMET RIADI.
14	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Penunjukan Nomor rekening Sdr. CHOLIK AMALIK.
15	1 (satu) bundl bukti transfer uang dari rekening Direktur CV. Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lestari keRekening Sdr. CHOLIK AMALIK.
16	1 (satu) buahbuku Tabungan Bank Lampung An. CHOLIK AMALIK No.rek : 385.03.04.10210.1
17	1 (satu) lembar bukti transfer UangTunai Bank BNI dariSdr. CHOLIK AMALIK keRekening Bank BNI An. SLAMET RIADI No.rek: 0345368289 jumlah uangRp. 25.000.000 tanggal 31 Maret 2015.
18	1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan An. CHOLIK AMALIK No.rek: 385.03.04.10210.1
19	1 (satu) bundle Rekening Koran An. Sdr. SLAMET RIADI No.rek Bank BNI : 0345368289.
20.	1 lembar SKPD warna merah an. Tiuran 1 (satu) 1 (satu) lembar Tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) warna Merah atas nama SUBADI, No. Pol : BE 8733 GE, No. SKPD : 0518731, Merk / Type : Honda Astrea, Jenis / Model : Sepeda Motor.
21.	1 (satu) Lembar Tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) warna Merah atas nama TUIRAN. K, No. Pol : BE 4285 GN, No. SKPD : 0727385, Merk / Type : Yamaha Vega ZR, Jenis / Model : Sepeda Motor.
22.	11 (sebelas) lembar laporan harian / Realisasi penerimaan PKB pada UPC Samsat Gunung Sugih yang ditanda tangani oleh AGUS FIRMANSYAH
23.	14 (empat belas) lembar tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) warna biru

No.9 s/d 23 Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin NIZOM SIRAJUDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Firmansyah Bin Nizom Sirajuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Firmansyah Bin Nizom Sirajuddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1	1 (satu) unit CPU merk LG warna Hitam.
2	1 (satu) unit Printer merk Epson Type LQ 2180 Warna Putih.

No. 1 s/d 2 dirampas untuk dimusnahkan;



3	1 (satu) unit Printer merk Epson Type LQ 2180 Warna Putih.
4	1 (satu) bundle Berkas Penyerahan STNK dari Locket 5 Samsat Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah.
5	1 (satu) bundle berkas cacatan penerimaan uang PNBP Administrasi STNK dan TNKB diloket 2 Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2015.
6	Asli 49 (empat puluh sembilan) lembar SKPD Wajib Pajak.
7	92 (Sembilan puluh dua) Arsip BBN1

*No. 3 s/d 7 dikembalikan Kepada Samsat Gunung Sugih;*

8	1 (satu) bundle berkas data pendaftar dari system IT DIPENDA terkait ke 111 kendaraan baru di Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
---	---

*No. 8 dikembalikan Kepada Dipenda Provinsi Lampung;*

9	70 (tujuh puluh) legalisir SKPD.
10	25 (dua puluh lima) Fotocopy SKPD Legalisir.
11	1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Akte Pendirian CV. Agung Lestari.
12	1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian / MOU Slamet Riadi dengan CV. Agung Lestari.
13	1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Sdr. SLAMET RIADI.
14	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Penunjukan Nomor rekening Sdr.



	CHOLIK AMALIK.
15	1 (satu) bundle bukti transfer uang dari rekening Direktur CV. Agung Lestari ke Rekening Sdr. CHOLIK AMALIK.
16	1 (satu) buah buku Tabungan Bank Lampung An. CHOLIK AMALIK No.rek : 385.03.04.10210.1
17	1 (satu) lembar bukti transfer Uang Tunai Bank BNI dari Sdr. CHOLIK AMALIK ke Rekening Bank BNI An. SLAMET RIADI No.rek: 0345368289 jumlah uang Rp. 25.000.000 tanggal 31 Maret 2015.
18	1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan An. CHOLIK AMALIK No.rek: 385.03.04.10210.1
19	1 (satu) bundle Rekening Koran An. Sdr. SLAMET RIADI No.rek Bank BNI : 0345368289.
20.	1 lembar SKPD warna merah an. Tiuran 1 (satu) 1 (satu) lembar Tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) warna Merah atas nama SUBADI, No. Pol : BE 8733 GE, No. SKPD : 0518731, Merk / Type : Honda Astrea, Jenis / Model : Sepeda Motor.
21.	1 (satu) Lembar Tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) warna Merah atas nama TUIRAN. K, No. Pol : BE 4285 GN, No. SKPD : 0727385, Merk / Type : Yamaha Vega ZR, Jenis / Model : Sepeda Motor.
22.	11 (sebelas) lembar laporan harian / Realisasi penerimaan PKB pada UPC Samsat Gunung Sugih yang ditanda tangani oleh AGUS FIRMANSYAH
23.	14 (empat belas) lembar tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) warna biru

No.9 s/d 23 Tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pernyataan banding pada tanggal 23 Desember 2016 No.24/Pid.Sus-Tpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 18 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Penyerahan Memori banding Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk. pada tanggal 18 Januari 2017.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2017 dan telah diserahkan ke kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 1 Februari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 20 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk.tanggal 19 Desember 2016,pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan alasan banding sebagai berikut :

- Bahwa Penerapan Unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 terhadap Terdakwa Tidak Tepat, karena Terdakwa berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan masyarakat umum. Terdakwa semestinya didakwa dan dituntut dengan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.
- Pembuktian Terdakwa melanggar asas unus testis nulus testis, karena pembuktian hanya berdasarkan Saksi Akhmad Abe Ronando.

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding yang diajukan Terdakwa tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dan dituntut berdasarkan dakwaan subsidairitas, Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tingkat pertama terlebih dahulu berkewajiban membutikan dakwaan primer terlebih dahulu, sepanjang berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dan pertimbangan hukumnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan primer, oleh karena itu dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang pada pasal 2 ayat (1) UU tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pustaka Gramedia, 2008) mengandung kata *numeralia* atau kata bilangan, yang berarti orang-orang atau semua orang tanpa membedakan status orang tersebut pegawai negeri atau swasta. Selain itu menurut majelis hakim tingkat banding, kata setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) juga harus dipahami dalam konteknya sebagai kata yang mengandung makna atau tanda/bunyi yang berhubungan dengan kata-kata lain yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi yang menjadi inti tindak pidana korupsi yakni unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara. Bukan kata yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa selama ini dalam praktik peradilan memang kerap ditafsirkan secara “sempit dan katagoristik”. Sehingga meskipun secara substansial perbuatannya telah memenuhi unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta merugikan negara, akan tetapi karena hanya mendasarkan pada pembagian katagori PNS dan bukan PNS sehingga Pasal 2 ayat (1) UU tersebut tidak mencakup pejabat negara atau pegawai negeri sipil. Pejabat negara atau pegawai negeri oleh majelis hakim kerap dimasukkan dalam unsur setiap orang dalam Pasal 3 UU TPK. Praktik peradilan seperti ini hanya menghasilkan kepastian hukum, bukan keadilan substansial;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Mahkamah Agung RI telah memberikan solusi dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama di Seluruh Indonesia Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang intinya menyatakan bahwa: “Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk orang baik swasta maupun pegawai negeri, Jadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri.”

Menimbang, bahwa dengan merujuk SE MARI di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa dengan mengenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengemukakan keberatan bahwa pembuktian kesalahannya berdasarkan fakta dipersidangan dari 26 (duapuluh enam) saksi hanya berdasarkan keterangan Saksi Akhmad Abe Ronando saja.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadilinya telah dilaksanakan kegiatan pembuktian, menggali dan mengungkapkan fakta-fakta mengenai terbuktinya setiap unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 184 dan 185 KUHP. Majelis Hakim tingkat pertama telah pula membahas atau menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertegas bahwa apa yang dikemukakan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya adalah tidak benar dapat diketahui dari keterangan beberapa saksi, selain Akhmad Abe Ronando yang secara jelas mengetahui dan melihat, bahkan menjadi korban perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut;

- a. Saksi Subadi Bin Suwito Rejo, pada pokoknya menerangkan Terdakwa Agus Firmansyah yang memberikan lembaran SKPD/Notice warna merah saat



membayar perpanjangan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun 2014 di UPC Samsat Gunung Sugih;

- b. Saksi Jumadi Bin Citro, pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat membayar perpanjangan pajak kendaraan bermotor tanggal 27 Januari 2015 di UPC Gunung Sugih Terdakwa Agus Firmansyah memberikan SKPD/Notice berwarna kuning;
- c. Saksi M.Beni Alvi Gautama, pada pokoknya menerangkan pernah beberapa kali melihat Terdakwa, sedangkan 1 lembar SKPD diambil dengan cara merobek dari rangkapan SKPD lainnya Agus Firmansyah hanya mencetak 4 rangkap SKPD;
- d. Saksi Sudarto, pada pokoknya menerangkan pernah melihat Terdakwa mengambil blanko SKPD/Notice lembar kesatu yang untuk diserahkan ke masyarakat.
- e. Badrun Bin Abas Nuh, pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar bulan Februari 2015 pernah melihat Terdakwa Agus Firmansyah mengambil blanko SKPD dari printer ruang UPC sebanyak 2 (dua) lembar. Yang diambil yang berwarna coklat dan rangkapannya tidak diambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya sebagaimana kesaksian Akhmad Abe Ronando, bahwa blanko SKPD/Notice diserahkan/diterimanya di kediaman rumah saksi Slamet Riyadi. Blanko kosong (SKPD/Notice) berwarna coklat tersebut diketik dan dicetak, Terdakwa Agus Firmansyah mengetahui pengetikan dan pencetakan tersebut. Selanjutnya dari hasil pencetakan blanko SKPD/Notice oleh Akhmad Abe Ronando dan Slamet Riyadi, Terdakwa menerima uang dari Abe Akhmad Ronando;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.200.000.000 dari kerugian negara sebesar Rp.385.537.400 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang terjadi pada Samsat Gunung Sugih sebagai bagian kerugian negara sebesar Rp.2.493.785.150,- (dua milyar empat ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa, majelis hakim tingkat banding perlu untuk mempertimbangkan besarnya uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdapat 3 versi jumlah uang negara yang diterima Terdakwa Agus Firmansyah sebagai berikut, (1) hasil berita acara pemeriksaan penyidik Polri kesaksian Akhmad Abe Ronando yang menerangkan Terdakwa menerima uang Rp.100.000.000,-(2) dakwaan Penuntut Umum yang mengemukakan Terdakwa memperoleh uang dari Akhmad Abe Ronando sebesar Rp.123.000.000,- dan (3) keterangan saksi Akhmad Abe Ronando di persidangan yang menerangkan Terdakwa Agus Firmans menerima uang sebesar RP.200.000.000 darinya..

Menimbang, bahwa berdasarkan versi yang berbeda tersebut, majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan, dengan logika hukum, bahwa keterangan Akhmad Abe Ronando yang dinyatakan di penyidik Polri yang benar. (1) SKPD yang diperoleh Akhmad Abe Ronando tidak hanya dari Terdakwa, tetapi juga dari isterinya yang diperoleh dari Samsat Chandra. (2) keterangan Akhmat Abe Ronando dipersidangan memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,- secara logikanya tidak dapat dijelaskan mengenai tempat dan waktu pemberiannya, sekali atau beberapa kali dalam tenggang waktu 2014 sampai 2015.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, majelis hakim tingkat pertama hanya membenarkan saja tanpa memberikan pertimbangan hukum yang kuat atas kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama di atas mengenai uang pengganti sebesar Rp.200.000.000. belum mempunyai "nilai objektif" yang dapat menjelaskan sebagai pertimbangan hukum yang mendasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi putusan tetapi juga sebagai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bahwa pertimbangan hukum merupakan proses psikologi yang dilakukan hakim dalam menalar fakta hukum sebagai kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar.

Menimbang, bahwa esensi dasar penerapan hukum acara pidana mengacu kepada KUHAP pada dasarnya adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil (*materiel wederrechtelijkheid*), ialah kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebesar yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pidana uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwaditahan menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;-





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1, jo Pasal 64 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding Terdakwa Agus Firmansyah Bin Nizom Sirajuddin tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 19 Desember 2016, Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tjk yang dimohonkan banding tersebut, sekedar besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Agus Firmansyah Bin Nizom Sirajuddin tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka



harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwaditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit CPU merk LG warna Hitam.
2. 1 (satu) unit Printer merk Epson Type LQ 2180 Warna Putih.  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
3. 1 (satu) unit Printer merk Epson Type LQ 2180 Warna Putih.
4. 1 (satu) bundle Berkas Penyerahan STNK dari Loket 5 Samsat Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah.
5. 1 (satu) bundle berkas catatan penerimaan uang PNPB Administrasi STNK dan TNKB diloket 2 Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2015.
6. Asli 49 (empat puluh sembilan) lembar SKPD Wajib Pajak.
7. 92 (sembilan puluh dua) Arsip BBN1

*Dikembalikan Kepada Samsat Gunung Sugih;*

8. 1 (satu) bundle berkas data pendaftar dari system IT DIPENDA terkait ke 111 kendaraan baru di Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

*Dikembalikan Kepada Dipenda Provinsi Lampung;*

9. 70 (tujuh puluh) legalisir SKPD.
10. 25 (dua puluh lima) Fotocopy SKPD Legalisir.
11. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Akte Pendirian CV. Agung Lestari.



- 12 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian / MOU Slamet Riadi dengan CV. Agung Lestari.
- 13 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Sdr. SLAMET RIADI.
- 14 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Penunjukan Nomor rekening Sdr. CHOLIK AMALIK.
- 15 1 (satu) bundle bukti transfer uang dari rekening Direktur CV. Agung Lestari ke rekening Sdr. CHOLIK AMALIK.
- 16 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Lampung An. CHOLIK AMALIK No.rek : 385.03.04.10210.1
- 17 1 (satu) lembar bukti transfer Uang Tunai Bank BNI dari Sdr. CHOLIK AMALIK ke rekening Bank BNI An. SLAMET RIADI No.rek: 0345368289 jumlah uang Rp. 25.000.000 tanggal 31 Maret 2015.
- 18 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan An. CHOLIK AMALIK No.rek: 385.03.04.10210.1
- 19 1 (satu) bundle Rekening Koran An. Sdr. SLAMET RIADI No.rek Bank BNI : 0345368289.
20. 1 lembar SKPD warna merah an. Tiuran 1 (satu) 1 (satu) lembar Tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) warna Merah atas nama SUBADI, No. Pol : BE 8733 GE, No. SKPD : 0518731, Merk / Type : Honda Astrea, Jenis / Model : Sepeda Motor.
21. 1 (satu) Lembar Tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) warna Merah atas nama TUIRAN. K, No. Pol : BE 4285 GN, No. SKPD : 0727385, Merk / Type : Yamaha Vega ZR, Jenis / Model : Sepeda Motor.
22. 11 (sebelas) lembar laporan harian / Realisasi penerimaan PKB pada UPC Samsat Gunung Sugih yang ditanda tangani oleh AGUS FIRMANSYAH
23. 14 (empat belas) lembar tindakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) warna biru

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*



7. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017. oleh Dr.Asra.SH.,MH., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Sidang, didampingi oleh Dr.Slamet Haryadi,SH.,M.Hum, dan Yusanuli,SH., M.Hum,Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor :01/Pen.SusPid./TPK/2017/PT.TJK., tanggal 3 Februari 2017 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Wakiyo, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
dto

Ketua Sidang  
dto

1. Dr.Slamet Haryadi, SH.,M.Hum.  
dto

Dr.Asra,SH.MH.

2. Yusanuli,SH.,M.Hum,

Panitera Pengganti  
dto  
Wakiyo,SH.

Untuk Salinan Resmi  
Panitera,  
..... Maret 2017

Hj. Sumarlina, SH.,MH.  
NIP. 19620802 198303 2 005